

Beranda > Opini >

# Hilirisasi Sebagai Regulasi Second-Best

Warta Kita  
April 24, 2026



Kebijakan hilirisasi harus diimbangi dengan langkah-langkah strategis lainnya untuk kelangkaan dan ketertinggalannya pada ekspor komoditas...

**HOME** BERITA KIPRAH OPINI UNIK

HOME | Tentang Pedoman Media Siber

ketergantungan pada ekspor komoditas mentah.

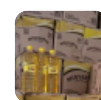
Kebijakan dilaksanakan dengan melarang ekspor bahan baku dan mendorong pengolahan di dalam negeri, negara diharapkan mampu menciptakan nilai tambah sekaligus memperkuat struktur industri nasional. Namun, cara pandang ini cenderung terlalu sederhana.

Dalam pemikiran Jean Tirole, regulasi tidak pernah berjalan dalam kondisi yang sempurna. Negara tidak memiliki informasi yang lengkap, tidak selalu bisa mengawasi perilaku pelaku usaha, dan juga memiliki keterbatasan dalam kapasitas institusinya. Karena itu, regulasi pada dasarnya bersifat *second-best*, yaitu tidak sepenuhnya menghilangkan masalah, tetapi hanya berusaha mengelolanya dalam kondisi yang terbatas.

Dalam konteks hilirisasi, relasi antara negara dan pelaku industri dapat dipahami sebagai kontrak implisit yang tidak lengkap. Negara bertindak sebagai perancang kebijakan, sementara perusahaan memiliki keunggulan informasi mengenai biaya produksi, efisiensi teknologi, dan potensi keuntungan.

Ketimpangan informasi ini menciptakan ruang bagi munculnya rente informasi (*information rent*), di mana keuntungan tidak sepenuhnya berasal dari efisiensi, tetapi dari kemampuan

## BERITA TERBARU



**OPINI** April 26, 2026  
**Pasar Yang Terlalu Tenang**



**BERITA** April 26, 2026  
**Menteri Nusron Jadi Narasumber Dalam Nus...**



**BERITA** April 26, 2026  
**Paskah Bersama, Lingkungan "Jagakali" Ad...**



**BERITA** April 25, 2026  
**Tingkatkan Kapasitas Dan Kompetensi Peng...**



**BERITA** April 25, 2026  
**Menteri Nusron Hadiri Perayaan Paskah Ke...**

perusahaan memanfaatkan keterbatasan regulator.

Akibatnya, insentif yang diberikan negara—baik melalui proteksi maupun fasilitas investasi—tidak hanya mendorong produksi, tetapi juga membentuk perilaku strategis. Perusahaan tidak sekadar berusaha menjadi efisien, melainkan juga menyesuaikan diri terhadap desain kebijakan. Dalam situasi ini, batas antara keuntungan yang lahir dari efisiensi dan keuntungan yang berasal dari kebijakan menjadi semakin kabur.

Persoalan menjadi lebih rumit karena negara harus menghadapi *trade-off*, atau pilihan sulit yang tidak bisa dihindari. Di satu sisi, insentif yang besar diperlukan untuk mendorong investasi dalam skala besar. Namun di sisi lain, insentif ini juga bisa membuka peluang munculnya *rente*, yaitu keuntungan yang diperoleh bukan karena efisiensi, tetapi karena perlindungan atau kebijakan yang diberikan negara.

Sebaliknya, jika negara berusaha menekan *rente* tersebut, dorongan untuk berinvestasi justru bisa ikut melemah. Artinya, tidak ada kebijakan yang benar-benar bebas dari dilema ini.

Di sisi lain, kebijakan hilirisasi juga membawa implikasi yang cukup luas terhadap struktur pasar. Kewajiban investasi besar dalam pembangunan fasilitas pengolahan secara langsung menciptakan hambatan masuk yang tinggi, karena tidak semua pelaku memiliki kapasitas modal dan teknologi untuk memenuhi persyaratan tersebut. Dalam jangka panjang, kondisi ini cenderung mendorong konsentrasi pasar dan memperkuat posisi pelaku tertentu yang sudah lebih dulu mapan. Akibatnya, ruang bagi pemain baru menjadi semakin terbatas.

Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan mengoreksi kegagalan pasar, tetapi juga secara aktif turut membentuk struktur pasar baru yang akan menentukan dinamika persaingan ke depan.

Integrasi vertikal yang muncul dalam proses ini sering dipandang sebagai upaya meningkatkan efisiensi melalui pengurangan biaya transaksi. Namun, dalam kerangka yang lebih strategis, integrasi juga dapat digunakan untuk mengontrol akses pasar dan membatasi pesaing. Risiko penguatan kekuatan pasar menjadi semakin nyata, terutama ketika mekanisme pengawasan tidak berkembang seiring dengan intervensi kebijakan.

Dimensi dinamis dari regulasi semakin memperumit situasi. Investasi dalam hilirisasi bersifat jangka panjang dan tidak mudah dibalik. Keputusan investasi sangat bergantung pada kredibilitas kebijakan. Ketika perusahaan memperkirakan bahwa keberhasilan mereka akan diikuti oleh pengetatan regulasi, muncul kecenderungan untuk tidak sepenuhnya mengungkapkan kapasitas efisiensi. Fenomena ini dikenal sebagai *ratchet effect*, di mana performa tinggi justru menurunkan insentif untuk berkinerja optimal di masa depan.

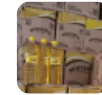
Selain itu, pembentukan *rente* dalam skala besar juga membuka ruang bagi *regulatory capture*. Dalam situasi tersebut, perusahaan yang menikmati keuntungan memiliki dorongan untuk memengaruhi proses regulasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengaruh tersebut bisa muncul melalui berbagai cara, mulai dari lobi kebijakan hingga pembentukan narasi publik. Akibatnya, kebijakan tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik, melainkan menjadi hasil tarik-menarik antara negara dan pelaku industri.

Dalam kondisi tersebut, menilai hilirisasi hanya dari capaian yang terlihat, seperti peningkatan kapasitas pengolahan atau nilai ekspor produk hilir, menjadi kurang memadai. Perhatian perlu diarahkan pada bagaimana insentif dibentuk dan didistribusikan, bagaimana struktur pasar berkembang, serta bagaimana pelaku industri merespons kebijakan yang ada. Di titik ini, proses yang berlangsung tidak hanya soal produksi, tetapi juga soal strategi dan adaptasi terhadap aturan.

Hilirisasi kemudian tampil sebagai bentuk regulasi *second-best* yang sarat kompromi. Distorsi

## OPINI



**OPINI** April 26, 2026  
**Pasar Yang Terlalu Tenang**



**OPINI** April 24, 2026  
**Hilirisasi Sebagai Regulasi Second-Best**



**OPINI** Maret 16, 2026  
**Mitos Persaingan Di Langit Indonesia: Me...**



**OPINI** Maret 14, 2026  
**Ketika Dunia Kerja Berlari, Tata Kelola ...**



**OPINI** Februari 27, 2026  
**Refleksi PISA Indonesia Dan Kausalitas D...**

## KATEGORI

Berita (8,881)

Kiprah (624)

Opini (226)

Unik (21)

tidak sepenuhnya hilang, tetapi bergeser dan berubah bentuk mengikuti desain kebijakan. Fokus pembahasan bergeser ke cara intervensi dijalankan: bagaimana keterbatasan informasi dikelola, bagaimana insentif dijaga tetap seimbang, dan bagaimana konsentrasi kekuatan pasar tidak semakin menguat.

**Januari Ayu Fridayani**  
**Dosen Prodi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomi**  
**Universitas Sanata Dharma**

*Penulis: Januari Ayu Fridayani*  
*Editor: L. Sukamta*

**SEBARKAN**

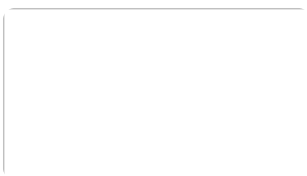
Pos sebelumnya  
SMA Kolese De Britto Berkolaborasi Dengan SMA  
Pangudi Luhur Yogyakarta Akan Tampilkan Pentas  
Teater “Sumur Tanpa Dasar” Di TBY

Pos berikutnya  
Tiga Pejabat Polres Klaten Berganti, Ini Daftarnya...

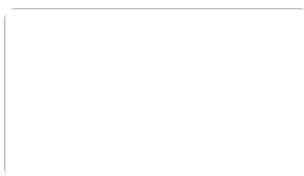
**POS TERKAIT**



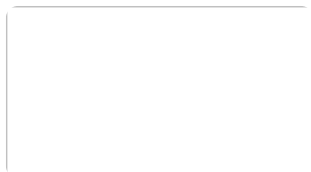
**Pasar Yang Terlalu Tenang**



**Mitos Persaingan Di Langit Indonesia: Mengapa Harga Tiket Pesawat Tetap Mahal?**



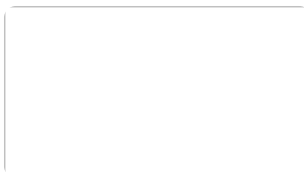
**Ketika Dunia Kerja Berlari, Tata Kelola Tertinggal**



**Refleksi PISA Indonesia Dan Kausalitas Digitalisasi**



**Menakar Marwah Tata Kelola Di Pasar Modal**



**Bertumbuh Di Tengah Proses**

**Tinggalkan Balasan**

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai \*

Kirim Komentar

**TENTANG**

**BERITA TERBARU**

OPINI April 26, 2026